

USULAN PROPOSAL PENELITIAN



DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP DISPARITAS PENDAPATAN DI PROVINSI JAMBI.

Oleh :

Anggota: Siswoyo., SE, ME/ 0028017001
Anggota: Ahmad Soleh, SE, ME/1015058502

Di biyai oleh:
Dipa Universitas Muhamamdiyah Jambi Tahun Anggaran 2020/2021

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAMBI**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	1
RINGKASAN	2
 BAB I. PENDAHULUAN.....	 3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Khusus Penelitian	4
1.4. Urgensi penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Konsep Desentralisasi fiskal	5
2.2. Konsep Keuangan Daerah.....	5
2.3. Dana Perimbangan	6
2.4. Disparitas Pendapatan Antar Daerah	6
BAB III.METODE PENELITIAN.....	8
3.1.Metode Penelitian	8
3.2.Metode Analisis Data.....	9
BAB IV. JADWAL PENELITIAN.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

Ringkasan

Pemerataan pembangunan merupakan keberhasilan dari proses pembangunan. Kondisi tersebut sulit terjadi karena adanya perbedaan potensi sumber daya alam maupun manusia, perbedaan demografi pada masing-masing wilayah sehingga menyebabkan perbedaan pertumbuhan antar daerah. Untuk itu pemerintah pusat melalui UU No.33/2004 memberikan dana transfer kepada pemerintah daerah untuk dapat digunakan sebagai dana perimbangan keuangan daerah untuk menjadi stimulus bagi daerah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah yang lainnya, sehingga penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan. Penelitian bertujuan: (1) Menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi fiskal; (2) Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis kuantitatif, menggunakan data sekunder dengan pendekatan *library reseach*. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan *Indeks Williamson* untuk masalah pertama, Tipologi Klassen untuk masalah kedua dan Regresi Berganda untuk masalah ketiga.

Kata kunci: Desentralisasi fiskal, Disparitas Pendapatan, *Indeks Williamson*, Tipologi Klassen.

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Ketimpangan antar daerah merupakan permasalahan umum disetiap negara, baik negara maju, negara berkembang dan negara miskin. Ketimpangan merupakan masalah klasik yang masih sulit untuk dipecahkan. Ha ini terjadi ketimpangan pembangunan, penguasaan sumberdaya alam dan perbendaan sumberdaya yang dimiliki antar wilayah.

Sebagai upaya mengurangi ketimpangan tersebut maka pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah yang ditetapkan pada UU No. 33 Tahun 2004 yang memberikan kebebasan kepada kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya baik dalam perencanaan maupun pembiayaannya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dan pembentukan daerah baru.

Mengikuti fenomena yang terjadi secara nasional, implementasi desentralisasi di Provinsi Jambi juga ditandai dengan peningkatan dana perimbangan dan pemekaran wilayah. Dimana Provinsi Jambi sebelumnya hanya terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota, setelah adanya desentralisasi fiskal menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.

Otonomi daerah dikatakan ideal apabila semua pengeluaran pemerintah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD nya, sehingga daerah menjadi benar benar otonom. Namun pada kenyataannya PAD hanya merupakan bagian porsi yang kecil dari total pendapatan daerah dan tidak mampu menjadi sumber pendapatan utama. Tujuan utama dari terbentuknya otonomi daerah adalah pemerataan pembangunan namun justru otonomi daerah menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi. Salah satu indikator yang untuk melihat keberhasilan pembangunan dan pemerataan adalah dengan melihat PDRB perkapita antar wilayah. Seperti halnya di wilayah kabupaten/kota di provinsi jambi menunjukkan variasi ketimpangan yang masih cukup tinggi. Artinya pembangunan antar wilayah di Provinsi Jambi masih belum merata.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berjalan lebih dari 15 tahun, dengan jangka waktu yang cukup lama tersebut, sangat perlu dilakukan evaluasi terkait dengan tujuan awal pembentukannya apakah sudah mencapai tujuannya atau belum. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah mengurangi disparitas pendapatan regional antar pemerintah daerah. Mengingat pentingnya masalah disparitas pendapatan regional antar pemerintah di Provinsi Jambi, maka tampaknya perlu dilakukan analisis secara mendalam tentang dampak yang telah ditimbulkan dari desentralisasi fiskal tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi?

1.3. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus dari penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan desentralisasi fiskal dan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan regional wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

1.4. Urgensi Penelitian

Urgensi dari penelitian ini adalah menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif terkait implementasi, dan dampak dari penerapan desentralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah proses transfer kekuasaan dalam membuat keputusan pada pemerintahan sub-nasional (Martinez and Mc.Nab dalam Anggono, 2020). Desentralisasi didefinisikan sebagai transfer wewenang dan tanggung jawab dalam fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintahan yang dibawahnya ataupun kepada sektor swasta. UU No.33 Tahun 2004, desentralisasi dinyatakan sebagai penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi merupakan wujud pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan memungut pajak (*taxing power*) dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah.

2.2. Konsep Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa: Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Keuangan daerah menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang telah diperbarui Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah : Keuangan

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terbagi dalam 3 yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (Dau) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah.

Sementara UU.No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan/kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan azas desentralisasi.

2.4. Disparitas Pendapatan Antar Daerah

Disparitas antar wilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor infrastuktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah Tetya (2010).

Beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah antara lain adalah: Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Indeks Jaime Bonet, Indeks Gini, Tipologi Klassen.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan *library reseach*. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bappeda dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi serta instansi terkait lainnya.

3.2. Metode Analisis Data

3.2.1. Alat Analisis

Untuk masalah pertama untuk menganalisis disparitas pendapatan digunakan model Indeks Williamson (Arsyad, 2010):

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Keterangan :

V_w = Indeks Williamson

Y_i = Pendapatan regional per kapita kabupaten/kota ke-i

Y = Pendapatan regional per kapita se provinsi

F_i = Jumlah penduduk di kabupaten/kota ke-i

n = Jumlah penduduk se provinsi

Dengan kriteria sebagai berikut:

- ketimpangan taraf rendah bila indeks Williamson $< 0,2$
- ketimpangan taraf sedang bila indeks Williamson antara $0,21 - 0,35$
- ketimpangan taraf tinggi bila indeks Williamson $> 0,35$

Menjawab masalah kedua, yaitu mengetahui bagaimana pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Disparitas Pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Jambi model regresi berganda dengan model sebagai berikut:

$$DPR = \beta_0 + \beta_1 DAUPK + \beta_2 DBHPK + \beta_3 DAKPK + \varepsilon$$

Keterangan :

DPR = Disparitas Pendapatan Regional

β_0 = Konstanta

DAUPK = Dana Alokasi Umum per kapita

DBHPK = Dana Bagi Hasil per kapita

DAKPK = Dana Alokasi Khusus per kapita

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

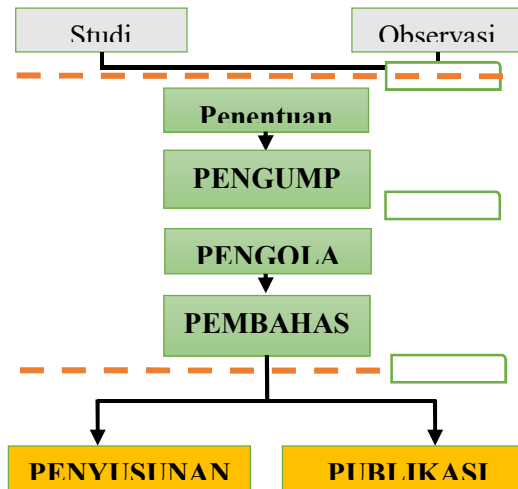
e = Standar error

Periode penelitian dari tahun 2001 sampai tahun 2015

yang selanjutnya dilakukan uji F, uji t dan uji asumsi klasik.

3.2. Tahapan Penelitian

Adapun beberapa tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



BAB IV **JADWAL PELAKSANAAN**

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2021					
		1	2	3	4	5	6
1	Pengumpulan literature dan penyusunan proposal	x					
	Persiapan, pengurusan izin, surat menyurat dll.		x				
	Penyusunan kuisisioner awal		x				
	Pengumpulan data dan reduksi data			x			
2	Penyusunan kuisisioner tahap lanjutan			x			
	Pengumpulan data dan reduksi data				x		
3	Analisis data dan perumusan strategi kebijakan				x	x	
	Penyusunan laporan kemajuan					x	
	Penyusunan dan penyempurnaan laporan akhir						x
	Publikasi artikel ilmiah						x
	Pelaporan administrasi dan penelitian						x

REFERENSI

- Undang-Undang, R. I. No. 33 Tahun 2004 tentang. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Anggono, P. (2020). The Effect of Fiscal Balance Funds on Local Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2).
- Anggono, P. (2020). The Effect of Fiscal Balance Funds on Local Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2).
- Indonesia, R. (2005). Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Lembaran Negara RI Tahun*, 140.
- Indonesia, P. (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan. *Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Tetya, O. (2010). *Analisis Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Kalimantan Selatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi* (Doctoral dissertation, Tesis. Jakarta: Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia).
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.
- Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak transfer pemerintah pusat terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2), 111-118.
- Basri, S. (2012). Desentralisasi Fiskal Dan Disparitas Regional Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 20(04).
- Nurman, M. A. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional Di Indonesia Tahun 2001-200. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 9(1), 1-20.
- Adlina, H. R. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2010-2017.
- Efriza, U. (2014). *Analisis Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Neda, I. G., & Mohammed, S. (2016). The tradeoff between growth and financial equality in financial decentralization policies (the case study of Iran). *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)* ISSN 2356-5926, 1(1), 1256-1267.
- Mudayen, Y. M. V., & Maridjo, H. (2018). The impacts of fiscal decentralization, institutional transformation, and regional revenue on income disparities between provinces in Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 20(3), 247-259.
- Juanda, B dan Junaidi. 2012. *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. IPB. Press. Bogor.